

BAB I

PENDAHULUAN

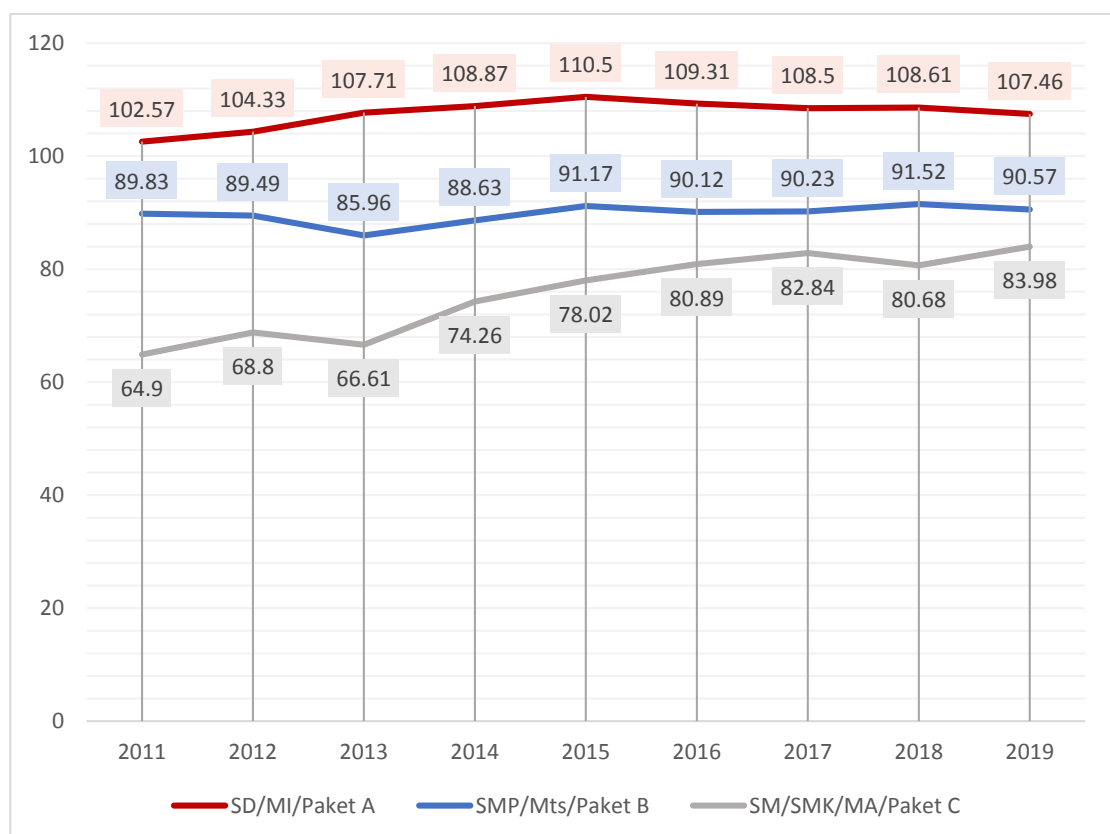
A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mempersiapkan manusia agar nantinya mampu menjalankan perannya di masyarakat. Setiap manusia memiliki potensi untuk berkembang dan memiliki hak untuk mengasahnya sesuai dengan Bunyi dari Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu : “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan” (Permendikbud, 2013). Alenia ke empat dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa pendidikan merupakan hak segala bangsa yang berarti seluruh manusia berhak mendapatkan pendidikan tanpa memandang latar belakangnya dan tanpa adanya diskriminasi. Pendidikan merupakan salah satu bidang penting yang terus diupayakan oleh pemerintah demi memperbaiki mutu masyarakat Indonesia (Rahmatin & Soejoto, 2017).

Daya saing suatu bangsa dapat ditingkatkan melalui pembangunan pendidikan yang pada akhirnya dapat menciptakan masyarakat Indonesia yang berkualitas. Keberhasilan program pemerintah untuk mendorong masyarakat dalam berpartisipasi dalam pendidikan dapat diukur oleh angka partisipasi sekolah. Angka Partisipasi Sekolah menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan fasilitas pendidikan. Terdapat dua tolak ukur untuk melihat angka partisipasi sekolah yaitu angka partisipasi sekolah kasar (APK) dan angka

partisipasi sekolah murni (APM). Perbedaan antara keduanya ialah perbedaan ketentuan mengenai standar usia dalam setiap jenjang pendidikan.

Persentase nilai APM akan lebih rendah dibandingkan dengan persentase nilai APK, karena Angka Partisipasi Murni menghitung penduduk peserta didik yang sedang menempuh pendidikan tepat waktu sesuai dengan jenjang pendidikannya. Berbeda dengan Angka Partisipasi Kasar yang menunjukkan keadaan yang sesungguhnya pada suatu jenjang tanpa melihat batasan umur. Adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas merupakan penyebab nilai angka partisipasi kasar yang dapat melebihi 100 persen.



Gambar 1.1. Rata-Rata Angka Partisipasi Kasar Indonesia tahun 2011-2019

Sumber: BPS 2019 (Data diolah).

Meningkatnya angka partisipasi kasar pendidikan dasar dan menengah merupakan salah satu sasaran pembangunan pendidikan dalam RPJMN 2015-2019. Dalam Buku I RPJMN 2015-2019 tertuang bahwa target 2019 untuk APK SD ialah 114,1 untuk APK SMP 106,9 dan untuk APK SMA 91,6 (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014). Melihat dari data APK 2019 menunjukkan bahwa sasaran pembangunan pendidikan RPJM 2015-2019 masih belum tercapai.

Angka Partisipasi Kasar sekolah menengah yang belum mencapai 100% setiap tahunnya yang menunjukkan masih ada masyarakat yang menghadapi kendala untuk mendapatkan pendidikan menengah. Angka partisipasi kasar pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki nilai yang paling rendah jika dibandingkan dengan APK pada SMP dan SD. Hal ini sejalan dengan masih belum adanya regulasi Wajib Belajar 12 tahun yang menyebabkan masyarakat belum wajib berpendidikan minimal sekolah menengah atas.

Angka partisipasi kasar jenjang SMA yang rendah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti partisipasi anak dalam sekolah yang tidak luput dari kondisi sosial ekonomi keluarga. Pendapatan yang diterima oleh orang tua berperan penting dalam keputusan anak untuk melanjutkan sekolah ke tingkat SMA/ sederajat, demikian juga pendidikan orang tua, semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua, akan menentukan pencapaian pendidikan anaknya (BAPPEDA 2018). Pernyataan ini di dukung oleh publikasi milik Badan Pusat Statistika yang menjelaskan bahwa dengan semakin meningkatnya jenjang pendidikan, akan diiringi dengan meningkatnya kebutuhan finansial (Badan Pusat Statistik, 2018).

Tabel 1.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ Sederajat Menurut Kelompok Pendapatan

Kelompok	2015	2016	2017	2018	2019
Kuintil 1	59,74	62,44	65,82	62,87	71,35
Kuintil 2	71,39	75,46	77,07	76,00	80,41
Kuintil 3	78,66	81,41	86,67	84,48	85,69
Kuintil 4	87,66	91,68	89,60	86,22	89,53
Kuintil 5	92,82	94,44	94,27	94,26	92,72

Sumber: Badan Pusat Statistika

Ekonomi suatu rumah tangga memiliki peran penting dalam menentukan pendidikan anggota rumah tangga tersebut. Status ekonomi rumah tangga digolongkan menjadi lima kuintil. Kuintil I dan II untuk status ekonomi terendah, kuintil III dan IV untuk status ekonomi menengah, dan kuintil V untuk status ekonomi tertinggi (Badan Pusat Statistik, 2018). Data menunjukkan adanya kesenjangan angka partisipasi kasar antar status ekonomi rumah tangga yang berbeda. Semakin tinggi status ekonomi rumah tangga, semakin tinggi nilai angka partisipasi kasar pada jenjang pendidikan sekolah menengah atas. Masyarakat dengan kelompok pendapatan 20% terbawah atau kuintil satu memiliki angka partisipasi kasar yang terendah dan perbedaan jarak yang tinggi antar kelompok dibandingkan dengan kelompok lainnya.

CNBC Indonesia yang mengutip data dari Badan Pusat Statistik (BPS), yang menyatakan adanya kenaikan rata-rata uang pangkal pendidikan di Indonesia mencapai 10-15% per tahunnya (Tim Redaksi CNBC Indonesia 2020). Data menunjukkan bukan hanya biaya pendidikan yang terus meningkat, tetapi biaya-biaya yang menunjang keberlangsungan proses belajar turut naik, sehingga mengakibatkan biaya yang dikeluarkan untuk dapat bersekolah menjadi lebih besar. Keadaan masyarakat yang berada dalam kemiskinan mengalami banyak

keterbatasan, salah satunya ialah keterbatasan dalam mengakses layanan pendidikan.

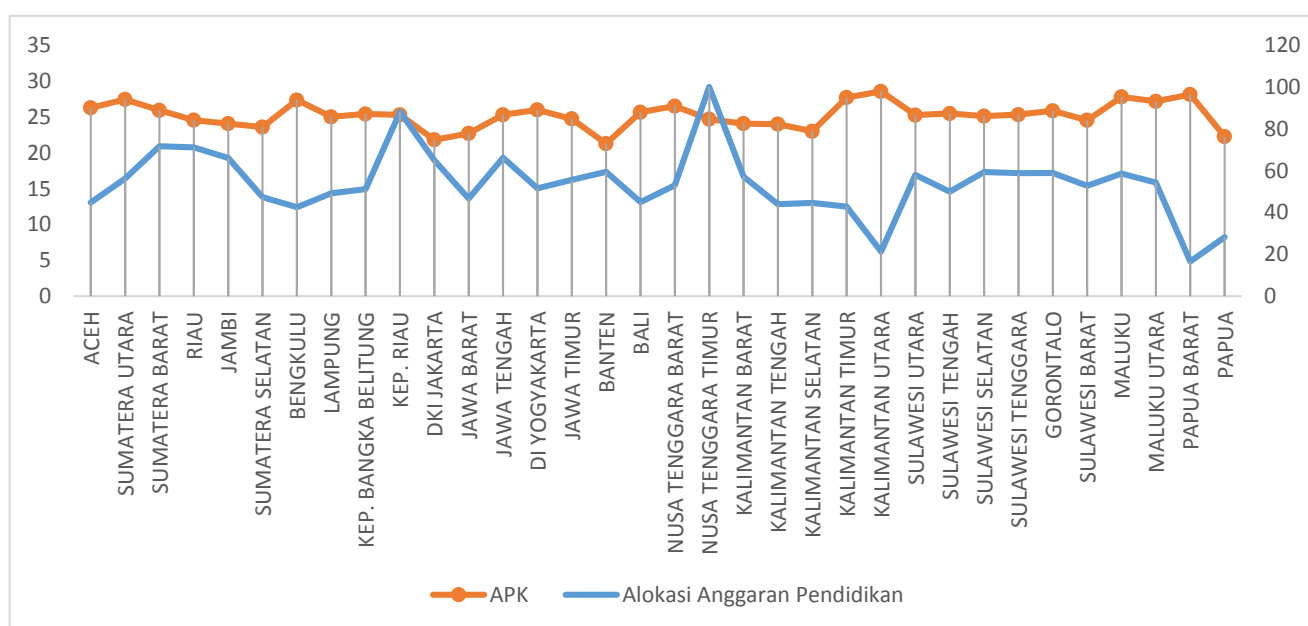
Tingginya persentase penduduk miskin berpengaruh terhadap angka partisipasi sekolah (Berlian VA, 2011). Hal ini sesuai dengan penelitian Sumarno dengan judul Angka Partisipasi Sekolah Kasar SMA Rendah Dampak Dari Tingkat Kemiskinan Dan Upaya Mengatasinya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang membuktikan bahwa Peningkatan kemiskinan diikuti oleh penurunan APS Kasar (Sumarno, 2019). Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian milik Anny Istiqomah, Sukidin dan Pudjo Suharso yang menganalisis partisipasi pendidikan pada masyarakat kurang mampu di Dusun Gumuk Limo, Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi Pendidikan, hal ini dibuktikan dengan tingkat Angka Partisipasi Kasar (APK) SD, SMP, SMA/SMK berkategori tinggi (Istiqomah Anny, Sukidin, & Pudjo, 2018).

Pendidikan merupakan kunci sebagai penentu kualitas sumber daya manusia di suatu Negara, untuk itu Pemerintah melalui instrumen APBN, telah mengalokasikan anggaran pendidikan yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sejalan dengan penerapan mandatory spending. Anggaran bidang pendidikan dalam APBN telah dialokasikan minimal sebesar 20 persen terhadap belanja negara sebagaimana yang diamanatkan Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 Amandemen ke-4 sejak tahun 2009 (Kementerian Keuangan, 2018). Tujuan ditetapkannya *mandatory spending* ini ialah untuk mengurangi masalah

ketimpangan sosial dan ekonomi daerah, salah satunya membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia.

Gambar 1.2. Grafik Anggaran pendidikan 2019 dan APK 2019 per provinsi

Sumber: BPS 2019 dan Neraca Pendidikan Daerah 2019 (Data diolah).



Anggaran pendidikan yang besar tidak menjamin partisipasi pendidikan tinggi.

Melihat dari data, Provinsi DKI Jakarta memiliki Alokasi anggaran pendidikan terbesar dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia, tetapi Provinsi DKI Jakarta memiliki nilai APK jenjang SMA yang rendah yaitu 74.77 masih berada dibawah rata-rata APK nasional yaitu 83.98. Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki anggaran pendidikan yang tinggi dan memiliki nilai APK jenjang SMA yaitu 84.63 dan berada di atas rata-rata nasional. Tinggi rendahnya rata-rata anggaran pendidikan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah

(PAD), alokasi dana dekonsentrasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi serta jumlah anak usia sekolah (Koto, 2015).

Pendidikan yang murah dipercaya akan memperluas akses semua kalangan untuk dapat mengenyam pendidikan. Alokasi anggaran sektor pendidikan dapat mempengaruhi angka partisipasi kasar. Penelitian milik Jolianis menunjukkan adanya peningkatan anggaran sektor pendidikan akan meningkatkan angka partisipasi sekolah (APS) di Sumatera Barat (Koto, 2015). Penelitian ini menggunakan nilai angka partisipasi sekolah untuk melihat pengaruh anggaran sektor pendidikan terhadap angka partisipasi sekolah. Penelitian bertolak belakang dengan penelitian milik Maharani Aulia R dan Yulhendri yang menemukan bahwa Perubahan yang terjadi pada anggaran sektor pendidikan tidak akan mengakibatkan perubahan pada Angka Partisipasi Kasar jenjang pendidikan SMP Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat (R & Yulhendri, 2020).

Berdasarkan latar belakang permasalahan, penelitian ini akan menguji pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Anggaran Pendidikan terhadap Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Atas. Peneliti mengambil studi kasus pada 34 provinsi di Indonesia tahun 2015-2019. Angka Partisipasi Kasar (APK) dipilih sebagai variabel penelitian untuk mengetahui banyaknya masyarakat yang sedang menempuh jenjang pendidikan SMA tanpa memandang batasan umur. Selain untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat pada suatu jenjang pendidikan, angka partisipasi kasar dapat menjadi acuan untuk melihat pemerataan dan perluasan akses pendidikan untuk seluruh lapisan masyarakat. Angka Partisipasi Kasar pada tingkat SMA dipilih peneliti karena ada kesenjangan partisipasi sekolah antar

kelompok golongan ekonomi di Indonesia. Selain itu, Angka Partisipasi Kasar pada tingkat sekolah menengah atas memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan jenjang pendidikan lain. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki kesempatan lebih tinggi untuk memenuhi kriteria perekrutan perusahaan, sementara pekerja dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah mungkin tidak memenuhi tuntutan dengan mudah (ILO, 2015).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat disusun rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh kemiskinan dengan Angka Partisipasi Kasar Tingkat SMA di Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh alokasi anggaran pendidikan dengan Angka Partisipasi Kasar tingkat SMA di Indonesia?
3. Apakah terdapat pengaruh alokasi anggaran pendidikan dengan kemiskinan di Indonesia?
4. Apakah terdapat pengaruh kemiskinan dan alokasi anggaran pendidikan dengan Angka Partisipasi Kasar SMA di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan yang tepat (valid, benar) dan dapat dipercaya tentang :

1. Mengetahui pengaruh kemiskinan terhadap angka partisipasi kasar tingkat sekolah menengah atas di Indonesia.

2. Mengetahui pengaruh alokasi anggaran pendidikan terhadap angka partisipasi kasar sekolah menengah atas di Indonesia.
3. Mengetahui pengaruh alokasi anggaran pendidikan terhadap kemiskinan di Indonesia.
4. Mengetahui pengaruh kemiskinan dan alokasi anggaran pendidikan terhadap angka partisipasi kasar tingkat sekolah menengah atas di Indonesia.

D. Kebaruan Penelitian

Pada penelitian ini peneliti akan meneliti tentang Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Alokasi Anggaran Pendidikan terhadap Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Atas. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang meneliti tentang angka partisipasi baik kasar maupun murni pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama terkait dengan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun, penelitian ini akan meneliti angka partisipasi kasar pada tingkat Sekolah Menengah Atas.